

Submitted: 27 Oktober 2020

Accepted: 1 Desember 2020

Published: 31 Desember 2020

Filsafat Politik dan Praktisnya dalam Persepektif Iman Kristen

Yonatan Alex Arifianto

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala Indonesia, Salatiga
arifiantoalex@stbi.ac.id

Aji Suseno

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang
ajisuseno@stbi.ac.id

Abstract

The progress of the nation and state cannot be separated from the role of mature society in responding to differences or political roles in every political activity and practice. By using descriptive qualitative methods through the literature this research can provide meaning and very important to political philosophy as an attitude of Christian faith to continue to provide examples, to become salt and light of the world for people around the political market. This article discusses the role and responsibility of believers in the state for the advancement of the country and others. Reflecting on the Bible as a basis for reference and examples from political philosophers to understand and interpret the perspective of Christian faith on politics.

Keywords: *political philosophy; christian faith; country; democracy; practical.*

Abstrak

Kemajuan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari peran masyarakat yang dewasa dalam menyikapi perbedaan atau peran politik dalam setiap aktivitas dan praktisnya politik. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui literature pustaka penelitian ini dapat memberikan makna dan tujuan begitu pentingnya filsafat politik sebagai sikap iman Kristen untuk terus memberikan teladan, menjadi garam serta terang dunia bagi manusai disekitar dalam market place politik. Artikel ini membahas tentang peran dan tanggung jawab orang percaya dalam bernegara untuk kemajuan negara dan sesama. Berkaca dari Alkitab sebagai dasar acuan dan teladan dari para tokoh filsafat politik untuk memahami dan memaknai perspektif iman Kristen tentang politik.

Kata Kunci: filsafat politik; iman kristen; negara; demokrasi; praktis.

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 tidak dapat dipungkiri menyisahkan persoalan di akar rumput di media sosial dengan maraknya hujatan dan makian dalam menerima dan menolak hasil pemilu presiden. Hal itu juga terjadi di setiap pemilihan kepala daerah dengan melibatkan masyarakat pendukung demi ketidakpuasan akan hasil pemilihan kepala daerah. Sedangkan dalam proses pemerintahan yang terpilih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dengan tertangkapnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.¹ Terlebih para pemimpin daerah yang dipilih dari urusan politik ini seolah-olah melupakan peran dan tanggung jawabnya kepada rakyat yang telah. Perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat dengan KKN seakan menjadi hal penting dan utama menambah pundi-pundi pribadi di setiap lima tahunnya. Situasi dan kondisi ini diperparah lagi dengan perebutan kekuasaan lewat jual beli jabatan yang dilakukan dengan cara-cara tidak sesuai dengan moral dan norma serta etika dan karakter dari bangsa Indonesia.

Permasalahan tersebut menjadi indikasi kekeliruan baik secara personal dalam

memegang jabatan maupun kesalahan edukasi politik yang tidak masif kepada kader partai atau elemen masyarakat dalam mempersiapkan generasi. Kegiatan politik yang menyangkut kekuasaan tidak bisa lepas dari partisipasi dan sikap untuk memperoleh perubahan dari masyarakat, sebab dalam politik masyarakatlah yang menjadi pelaku penting politik tersebut. Politik Juga dimainkan oleh oknum-oknum tertentu demi mendapatkan sebuah kekuasaan. Kekuasaan menjadi pusat daripada dunia politik, sehingga demi kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara personal maupun secara kelompok.² Sebab keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dan antar warga negara dengan negara yang dijalankan dan dipatuhi serta dihormati. Hal itu merupakan demokrasi sebagai perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis. Pada hakekatnya demokrasi merupakan kumpulan orang yang mampu bernegara.³ Namun umat Kristen Indonesia menjalankan peran politisnya secara seram-

¹ Lia Hutasoit, "KPK Sudah Tangkap 100 Kepala Daerah," *IDN Times*, 2018.

² Alfons Renaldo Tampenawas, "Pandangan Eklesiologi Calvin Mengenai Politik Praktis

Dalam Pelayanan Gereja," *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 115–127.

³ Riski Febria Nurita, "Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* (2015).

pangan, tanpa perspektif bersama yang jelas yang berasal dari Alkitab sebagai sumber kebenaran iman tertinggi yang tertulis.⁴ Sikap ini selanjutnya diwujudkan dalam sebetuk seruan ekumenis yang dari sudut politis tetap tersamar, yaitu "partisipasi gereja dalam pembangunan."⁵

Peneliti dalam artikel ini berusaha menyikapi persoalan politik yang terjadi dibangsa Indonesia dengan sudut pandang iman Kristen sebagai acuan memberikan pedoman kepada orang percaya untuk bersikap benar dan memulikan Tuhan dalam disaat menjadi bagian dari politik, karena melalui politik manusia mampu memanusikan diri dan sesamanya.⁶ Filsafat politik mengupayakan kebahagiaan atau kesenangan sejati, dan kesenangan sejati dapat terwujud manakala manusia dalam konteks politik tidak mengedepankan kesenangan indrawi ketika menerapkan pemeran politik dalam panggung kekuasaan.⁷ Walaupun memang tugas filsafat

politik adalah menganalisis secara normatif, menyingkap dan mendiskusikan secara kritis isi normatif yang ada dalam konteks sosio-budaya. Kemudian merumuskan kembali dalam kerangka prinsip umum dengan metode pembenaran yang mudah dipahami.⁸ Namun hal itu harus dikaji dalam nilai dan pandangan iman Kristen dengan menjadikan Alkitab sebagai pedoman penafsirannya.⁹ Lebih lanjut artikel ini akan mendeskripsikan pemahaman politik dalam tema peran filsafat politik dan praktisnya dalam persepektif iman Kristen.

METODE

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana filsafat politik dan praktisnya dalam persepektif iman Kristen dalam memberikan pedoman kepada orang percaya untuk bersikap benar dalam berpolitik. Maka penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif.¹⁰ Data-data peran filsafat politik

⁴ Kosma Manurung, "Studi Analisis Kontekstual Ajaran Karunia Nubuat Rasul Paulus Sebagai Dasar Evaluasi Kritis Terhadap Fenomena Bernubuat Di Gereja Beraliran Karismatik," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (October 25, 2019): 37–54, accessed November 23, 2019, <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/189>.

⁵ Martin Lukito Sinaga, "Umat Kristiani Dan Politik Praktis Di Indonesia: Dari Politik Minoritas Ke Politik Pluralisme," *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* (2017).

⁶ Fransiskus Sales Lega, "FILSAFAT POLITIK KANT DAN RELEVANSINYABAGI

PERLINDUNGAN MARTABAT MANUSIA," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 8, no. 1 (2016).

⁷ J.H Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali, 1988), 34.

⁸ Ibnu Rusydi, "Filsafat Politik Islam," *RISALAH Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, 1, no. 1 (2015).

⁹ Kosma Manurung, "Ketubim Dan Nubuat," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (July 23, 2020): 129–140, accessed November 4, 2020, <https://10.0.141.174/pengarah.v2i2.24>.

¹⁰ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian

dan praktis-nya dalam persepektif iman Kristen yang ditemukan tersebut diinventarisasi baik maknanya maupun konteks-nya. Setelah terumuskan konsep filsafat politik dan praktisnya dalam persepektif iman Kristen kemudian dikembangkan penerapannya untuk masa kini. Dengan menggunakan Alkitab sebagai sumber primer dan juga memasukkan literatur pustaka terbaru serta penulis juga menggunakan berbagai artikel jurnal untuk menambah penelitian pustaka ini dalam menelusuri studi kritis tersebut. Sehingga hasil studi dari perspektif iman Kristen dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan sikap berpolitik.

PEMBAHASAN

Hakikat Politik dan landasannya

Politik berasal dari bahasa Yunani adalah polis yang artinya negara-kota. Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Manakala manusia mencoba untuk untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mereka ber-

usaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibuk dengan suatu kegiatan yang dapat di namai sebagai Politik.¹¹ Dalam ranah pemerintahan politik sejatinya adalah penerapkan kendali di dalam masyarakat lewat pemberdayaan keputusan kolektif. Sebagai produk hubungan publik, politik memberikan kekuasaan sebagai bagian dari kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain guna menuruti kehendaknya.¹² Politik juga dapat dipahami sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.¹³ Politik menduduki tempat yang paling penting karena bagian yang terkandung dari pemahaman isi dan landasan filsafatnya mempunyai tujuan politik yang memberikan nilai positif. Namun politik bukanlah tujuan dalam dirinya, tetapi sebagai sarana untuk memperoleh tujuan terakhir bagi manusia yaitu kebahagiaan.¹⁴

Agama,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38.

¹¹ Carlton Clymer Rodee and dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, 5th ed. (Jakarta: Rajawali press, 2002), 2–3.

¹² Andrew Heywood, *Politics and Edition* (New York: Palgrave MacMillan, 2002), 7–12.

¹³ Adolf Bastian Simamora, “POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA,” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* (2019).

¹⁴ Edi Sumanto, “PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik juga sering dikaitkan dengan hal penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang menyelenggarakannya bukan rakyat, tetapi pemerintahan yang berkuasa. Hanya saja partisipasi rakyat sangat diharapkan. Tujuannya agar kerja pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Percuma suatu pemerintahan menyelenggarakan Negara tanpa dukungan dari rakyat.¹⁵ Sehingga tujuan dari berpolitik adalah kebahagiaan. Sejatinya politik Kristen dipahami dengan maknanya yang luas, maka ia adalah horison kehadiran Kekristenan di mana peran dirinya dapat mendorong transformasi seluruh kehidupan. Politik dalam arti yang luas tidak hanya sekadar perebutan kekuasaan (power), tetapi juga penegasan arah etis demi pemberdayaan (*empower*) kehidupan bersama.¹⁶

Politik akan terjadi manakala manusia mengedepankan kesenangan dunia ide, dunia yang ideal yang ada dalam dunia ideal pula. Plato meyakini suatu negara akan tercipta idealitasnya di mana

semua warganya bahagia manakala negara tersebut memiliki seorang pemimpin, yakni; filsuf raja. Dalam terminologi filsafat Plato; filsuf raja yakni orang yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi. Oleh karena itu begitu pentingnya landasan politik bagi kemajuan orang lain maupun kelompok dalam pemerintahan yaitu falsafah atau filsafat yang mendasarinya. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu philo dan sophia. Dua kata ini mempunyai arti masing-masing philo berarti cinta dalam arti lebih luas atau umum yaitu keinginan, kehendak. Sedangkan sophia mempunyai arti hikmah, bijaksana, dan kebenaran. Jadi, secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Atau mencintai kebijaksanaan'. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata filsafat disebut dengan istilah "philosophy", dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "falsafah", yang biasa diterjemahkan dengan „cinta kearifan.¹⁷ Namun Istilah philoshophia memiliki akar kata philien yang berarti mencintai dan sophos yang berarti bijaksana atau dapat diartikan yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pen-

Thomas Aquinas),” *EL-AFKAR Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (2017).

¹⁵ J.H Rapar, *Filsafat Politik Plato*.

¹⁶ Sinaga, “Umat Kristiani Dan Politik Praktis Di Indonesia: Dari Politik Minoritas Ke Politik Pluralisme.”

¹⁷ Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum* (Jakarta: Rajawali press, 2011), 1.

cinta pengetahuan disebut dengan filsuf atau filosof.¹⁸ Sedangkan Filsafat Politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari topik dan tema seperti politik, kebebasan berpendapat dan demokrasi, keadilan, hak milik, hak, hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh pemerintahan maupun otoritas.

Dalam filsafat politik, martabat manusia merupakan salah satu tema sentral. Politik pada hakikatnya diusahakan untuk memajukan atau meningkatkan kualitas kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Politik membuat manusia menjadi semakin manusiawi. Hal itu berarti politik adalah sarana atau alat untuk membantu manusia merealisasikan potensi-potensinya dan bukan sebaliknya, manusia sebagai sarana politik. Politik yang sesungguhnya harus respek terhadap martabat manusia.¹⁹ Filsafat politik bukan hanya mempersoalkan hakikat, fungsi dan tujuan Negara, melainkan juga membahas soal keluarga dalam Negara, pendidikan, agama, hak dan kewajiban individual, kekayaan dan harta milik pemerintah dan juga filsafat

politik bersifat normatif dan bersangkutan dengan nilai-nilai.²⁰ Berfilsafat politik juga sebagai aktivitas dan tugas manusia sejauh manusia itu sendiri melakukan kegiatannya yang terhubung dengan kekuasaan. Aktivitas ini milik setiap orang, tidak hanya para politikus atau tokoh masyarakat. Artinya, sejauh manusia berpikir dengan akal budinya, setiap orang memiliki perhatian (*concern*), rasa cinta (*care*), dan keterlibatan (*involvement*) pada tata hidup masyarakatnya.²¹ Sebab masyarakat adalah penentu politik itu sendiri dan sebagai fungsi kontrol politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.²²

Dalam buku Julian Baggini juga dapat diartikan bahwa filsafat politik adalah mengenai cara kita membenarkan berbagai bentuk pemerintah, ideologi politik, hukum dan ciri lain dari negara. Ia bukan studi tentang bagaimana rezim dan sistem yang berbeda sebenarnya bekerja, tetapi sebuah investigasi ke dalam prinsip dan argumentasi apa yang bisa digunakan untuk mendukung atau mengkritik bentuk-bentuk umum lembaga dan kepercayaan politik.

¹⁸ Edi Sumanto, "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)."

¹⁹ Lega, "FILSAFAT POLITIK KANT DAN RELEVANSINYABAGI PERLINDUNGAN MARTABAT MANUSIA."

²⁰ Ali Imron, "FILSAFAT POLITIK HUKUM PIDANA," *Jurnal Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014).

²¹ Armada Riyanto, *BERFILSAFAT POLITIK* (Yogyakarta: kanisius, 2011), 5.

²² Alter I Wowor, "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern," *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* (2018).

Filsafat politik juga menyelidiki hal-hal di balik hiruk pikuk banyak debat politik dan menguji soal yang lebih abadi.²³ Sedangkan Madung menyatakan bahwa: Filsafat politik merupakan satu cabang filsafat moral (praktis) yang merefleksikan secara ilmiah-filosofis persoalan institusi dan organisasi kenegaraan.

Refleksi tentang negara perlu dibuat, sebab dalam sejarah negara tidak selalu ada dan tidak semua manusia atau kelompok budaya hidup dalam negara.²⁴ Jadi, pengetahuan filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. Filsafat Politik juga dapat dimaknai sebagai pemikiran-pemikiran yang berkaitan tentang lingkup politik dan juga merupakan tempat menerapkan ide filsafat. Ada berbagai macam ide-ide filsafat yang ikut mendorong perkembangan politik modern yaitu liberalisme, komunisme, pancasila, dan lain-lain.²⁵ Selaras dengan hal itu Yosef Korten mengungkapkan Filsafat politik merupakan studi tentang penilaian dan kritik moral terhadap proses yang melan-

dasi kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang diarahkan pada penciptaan susunan organisasi masyarakat yang baik dan tepat.²⁶ Sebab konsep atau bentuk sebuah negara akan menentukan corak kebijakan politik sebuah negara. Pada gilirannya konsep negara tersebut berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakatnya.²⁷ Dalam pelaksanaannya negara diberi kewenangan dan mandat untuk menata dan memelihara ketentraman masyarakat guna mewujudkan tujuan bersama.²⁸ Dunia politik mempunyai peran yang sangat signifikan dalam realita kehidupan suatu negara, oleh karena politik itu sendiri adalah ibarat kunci kehidupan negara yang menjadi penentu arah kebijakan dan masa depan negara.²⁹

Tokoh Filsafat Politik

Plato

Pemikiran politik filsuf Yunani kuno yaitu Plato merupakan sebuah pemikiran klasik perihal manusia menjalankan kehidupan antara memimpin dan dipimpin. tidak seperti pemikiran politik dan pamerintahan modern yang mencapai

²³ Julian Baggini, *Lima Tema Utama Filsafat* (Jakarta: Teraju, 2004), 183–184.

²⁴ O.G Madung, *Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Maumere: Ledalero, 2013), 1–2.

²⁵ Imron, "FILSAFAT POLITIK HUKUM PIDANA."

²⁶ Ibid.

²⁷ Abdullah Said, "Filsafat Politik Al-Farabi," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 63–78.

²⁸ Ibid.

²⁹ Wowor, "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern."

konsep-konsep kompleks yang menyangkut hal teknis dalam mengelola masyarakat, Plato melalui Socrate justru menekankan pentingnya rasa keadilan sebab menjadi pertanyaan yang selama ini terjadi apakah pemimpin tersebut telah menciptakan keadilan atau ketidakadilan?³⁰ Sebab dalam pemikiran filsafat Plato, ada garis yang menghubungkan persamaan di antara pemikiran mereka, yaitu bahwa sebuah negara tidak bisa dilepaskan dari individu yang mempunyai kualitas moral baik. Hal ini bisa dilihat bagaimana perhatiannya terhadap keadilan, kebijaksanaan, dan nilai moral lainnya tidak bisa dilepaskan dalam pembahasan mereka mengenai kehidupan manusia dalam politik.³¹

Socrates

Socrates yang merupakan salah satu filsuf terkemuka yang lahir 469 SM, merupakan seorang filsuf yang sangat kritis. Socrates sangat kritis dalam mempertanyakan sesuatu yang dianggap benar dan tidak mudah percaya kepada kebenaran tanpa melakukan penyelidikan. Menurut filsuf ini untuk mencapai kebajikan (*virtue*) manusia harus memiliki pengetahuan dan tolok ukur mengenai apa yang

baik dan buruk. Tujuan tertinggi kehidupan manusia memuat dirinya atau jiwanya secara menyeluruh tumbuh dan berkembang serta menjadi sebaik mungkin dan mampu diraih bila manusia memiliki hakikat yang baik. Menurut Socrates tugas negara adalah memajukan kebahagiaan para warga negaranya dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Seseorang penguasa harus mempunyai pengertian tentang “yang baik”. Ada satu hal lagi yang perlu kita tahu dengan pemikiran politik Socrates, beliau tidak menyetujui konsep demokrasi yang didasarkan pada suara mayoritas karena menurut beliau tidak semua orang (dalam mayoritas) memiliki pengetahuan baik.

Aristoteles

Menurut Aristoteles negara merupakan lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi hanya karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan yang paling tinggi dan mulia. Tujuan dibentuknya Negara adalah untuk mensejahterahkan seluruh warga negaranya, bukan individu-individu tertentu (seperti

³⁰ Muhammad Fadil, “GAGASAN DASAR MENGENAI ETIKA DAN NEGARA MENURUT PLATO (SEBUAH PENGENALAN AWAL FILSAFAT POLITIK KLASIK),” *PARADIGMA* :

Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya 9, no. 1 (2008).

³¹ Ibid.

Plato). Tujuan lain dari sebuah negara menurut Aristoteles adalah memanusiaikan manusia. Dan juga negara yang baik adalah negara yang sanggup mencapai tujuan – tujuan negara, sedangkan negara yang buruk adalah negara yang gagal menciptakan cita-cita itu. Perbedaan lain yang terlihat antara Aristoteles dan Plato terlihat dari apa yang sebelumnya diungkapkan oleh Plato bahwa beliau tidak membenarkan hak milik individu, namun Aristoteles membenarkan itu. Karena menurut Aristoteles hak milik penting karena memberikan tanggung jawab kepada seseorang untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan social dan menurut Aristoteles hak milik akan memungkinkan orang untuk memikirkan persoalan negaranya.³²

Aquinas

Thomas Aquinas berpendapat bahwa eksistensi negara bersumber dari sifat alamiah manusia. Salah satu sifat alamiah manusia adalah watak atau karakternya yang bersifat sosial dan politis.³³ Menurut Thomas Aquinas, negara merupakan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia

memenuhi kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota.³⁴ Sejalan dengan pendapat di atas, Thomas Aquinas menjelaskan bahwa negara merupakan bagian integral alam semesta, memiliki sifat dan karakter dasar yang mirip dengan mekanisme kerja alam semesta pula. Negara merupakan suatu sistem tujuan yang memiliki tatanan hirarki, dimana yang berada di atas memiliki fungsi untuk memerintah, menata, membimbing dan mengatur yang berada di bawah atau lebih rendah.³⁵ Oleh karena itu Pemikiran-pemikiran filsafat politik Thomas Aquinas sangat memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan ilmu politik. Aquinas dapat dianggap telah mengembangkan sebuah pandangan politik sebagai kekuasaan positif dalam kehidupan manusia. Pemikiran-pemikirannya mampu mengakomodasi hirarki tradisional dengan bangkitnya gagasan tentang komunitas dan menyusun parameter-parameter untuk pembahasan masalah-masalah moral yang sulit dalam lingkup lewat politik lewat kehebatan dan penanganannya atas hukum alam. Aquinas

³² Akhmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia Utama, 2001), 21.

³³ Yushak Soesilo, "Pentakostalisme Dan Aksi Sosial: Analisis Struktural Kisah Para Rasul 2:41-47," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (April 23, 2018): 136–

151, accessed June 17, 2020, doi: <https://doi.org/10.30648/dun.v2i2.172>.

³⁴ A. Mustofa, *Filsafat Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 131.

³⁵ Edi Sumanto, "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)."

berkesimpulan lewat pengamatan berbagai masalah kontemporer yang ditemukannya.

Augustine

Pembahasan Augustine tentang politik dalam konsep keinginan, ambisi dan dorongan seseorang dalam masyarakat sipil hanya bisa disatukan menjadi kebaikan bersama oleh cinta Tuhan sebab cinta itu menjadi acuan bersama, ikatan kohesif yang membedakan kerumunan massa dari masyarakat yang sejati.³⁶ Peran negara dianggap perlu karena watak manusia yang sudah menyeleweng akibat dosa. Negara juga dalam persepsinya adalah perlu diwujudkan untuk mencapai tujuan duniawi manusia. Aspek paling penting dalam pemikiran filsafat politik Augustine adalah basis teologis yang diberikannya pada wilayah hak-hak manusia.³⁷ Negara dapat juga dikatakan sebagai milik kepunyaan Tuhan yang didasarkan oleh cinta kasih Tuhan yang bersifat kekal, merupakan faktor perekat yang mengintegrasikan negara menjadi suatu kesatuan politik. Dan hal itu harus menjadi Merupakan kepatuhan warga negara terhadap hukum-hukum negara yang dilaksanakan atas kesadaran kolektif. Semua dilakukan demi mencapai

kebaikan bersama dan kebaikan bersama ini sebagai perhatian utama dalam negara dalam otoritas Tuhan.

Politik dalam pandangan Kekristenan

Berbicara tentang politik, ada anggapan bahwa politik itu bukan urusan gereja dengan alasan dapat mencemarkan kekudusan gereja.³⁸ Belajar dari Yesus sebagai teladan iman kekristenan dalam menanggapi politik, Yesus sendiri tidak menghindar atau menolak berbicara tentang pemerintahan yang bernuansa politik. Yesus mendapat pertanyaan politik dari orang-orang Farisi dan Herodian tentang pajak, “Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” (Mat. 22:17). Yesus menjawab dengan bijak dan menjadikan jawaban itu adalah perintah bagi semua orang “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat. 22:21). Perintah Yesus ini adalah kewajiban bagi orang percaya untuk mendukung pemerintahan. Membayar pajak kepada negara merupakan bagian dari kegiatan menunjang negara dan politik. Kehadiran gereja dalam

³⁶ Hendry J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 155.

³⁷ Ibid.

³⁸ Simamora, “POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA.”

dimensi politik tidak bisa dielakkan, karena politik menjadi sarana bagi gereja dan teologi untuk mengaktualisasikan kepercayaan, teori, dan ajaran yang hidup di dalamnya.³⁹

Pencobaan Yesus dipadang gurun juga dapat memberikan pengertian bahwa kekuasaan dapat menjadikan seseorang hilang ketaatannya kepada Tuhan walaupun dalam narasi tersebut Yesus mampu mengalahkan tipu daya iblis (Mat. 4:8-11). Iblis selalu berusaha menyesatkan manusia dengan siasatnya. Ia memakai dunia dengan segala kesenangannya sebagai promosi yang tampaknya baik namun jika tidak diwaspadai dapat menjerat manusia ke dalam jebakannya.⁴⁰ Pada zaman Yesus orang menginginkan dan mendambakan untuk menjadi penguasa yang dapat membereskan persoalan negara dalam jajahan kekaisaran romawi baik ekonomi, sosial dan politik yang di hadapi. Sebab terkesan dengan kesanggupan dan kharisma serta kekuatan Yesus, orang-orang ingin agar Yesus terjun ke dalam kancah politik. Yesus tidak memulai kampanye untuk menyingkirkan ketidakadilan dunia, mes-

kipun ada yang berupaya menyeretNya agar terlibat dalam isu-isu kontroversial di zamannya. Namun pada intinya Yesus tidak pernah ingin terlibat di dalam urusan politik. Penulis Injil Yohanes mengatakan, “ketika Yesus tahu bahwa mereka akan segera datang dan hendak membawanya dengan paksa untuk menjadikannya raja, ia sekali lagi mengundurkan diri ke gunung sendirian” (Yoh. 6:10-15). Secara praktis Yesus tidak mau terlibat dalam politik dan kekuasaan negara karena tujuan Yesus jauh lebih besar dari tujuan hanya menjadi seorang pemimpin negara. Tujuan Yesus adalah keselamatan manusia dalam kekekalan.⁴¹

Gereja ada di dunia, itu berarti harus menerangi dunia termasuk politik. Hak politik haruslah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat. Berpolitik di sini adalah memperjuangkan hak umat. Bukan masuk dalam partai politik dan memperebutkan kekuasaan.⁴² Gereja sebagai penyalur suara kenabian harus terus menunjukkan eksistensinya. Sebab kegiatan dan tindakan politik praktis yang ada didunia ini hanyalah sebuah cara yang Allah gunakan

³⁹ Wowor, “Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern.”

⁴⁰ Yonatan Alex Arifianto and Asih sumiwi Rachmani, “Peran Roh Kudus Dalam Menuntun Orang Percaya Kepada Seluruh Kebenaran Berdasarkan Yohanes 16 : 13,” *Jurnal Diegesis* 3, no. 1 (2020): 1–12.

⁴¹ Simamora, “POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA.”

⁴² Marulak Pasaribu, *Eksposisi Injil Sinoptik* (Malang: gandum mas, 2005), 135–138.

untuk menggenapi kehendak-Nya. Meskipun iblis dan nabi palsu serta orang-orang jahat menyalahgunakan kekuasaan politik mereka, untuk memanfaatkannya dengan melakukan hal-hal yang jahat terhadap Allah dan manusia namun Allah memakainya untuk kebaikan, karena Dia turut bekerja “dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah” (Rm. 8:28). Sebab sejatinya pemerintah dan berbagai falsafahnya tidak bisa menyelamatkan orang percaya dari segala dosa. Namun hanya Allah yang bisa, maka itu Alkitab tidak pernah mengintervensi Yesus ataupun para rasul mencurahkan waktu dan tenaga untuk mengajar orang-percaya mengenai cara mencintai dunia dengan segala hal yang ada.

Sebagai orang percaya ada tanggung jawab yang harus didekikasikan kepada pemerintah untuk mentaati hukum dan segala hal yang menyangkut kehidupan hak dan kewajiban serta taat juga menjadi warga negara yang benar dihadapan Tuhan dan sesama (Rm. 13:1-2). Karena Allah telah menetapkan semua otoritas dengan segala hal yang Allah rencanakan bagi kehidupan orang percaya (1 Ptr. 2:13-15).

Paulus berkata di surat Roma 13:1-8 bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah untuk berkuasa dengan penuh otoritas atas semua orang yang ada dibawah kekuasaannya. Namun orang percaya harus terlebih mentaati kehendak Dia-lah yang harus diutamakan di atas segala sesuatu dan semua orang (Mat. 6:33). Sebab Rencana dan tujuan Allah itu pasti dan kehendak-Nya tidak bisa diganggu gugat oleh orang yang berkuasa sekalipun. Apapun yang Allah rencanakan, Dia akan melaksanakannya. Tidak ada satupun pemerintahan yang dapat menghalangi kehendak-Nya (Dan. 4:34-35). Karena Kekuasaan Allah kekal dan juga Allahlah yang “memecat raja dan mengangkat raja” (Dan. 2:21) karena “Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya” (Dan. 4:17). Maka untuk itu nilai-nilai Kristiani yang diterapkan dalam kehidupan sosial harus sampai bisa mengubah kehidupan individu yang menjadi pembawa nilai tersebut bahkan juga dapat mengubah masyarakat sosial dan lingkungan dimana ia berada.⁴³ Oleh sebab itu orang percaya dan pemerintahan seharusnya saling mendukung dan menopang dalam melaksanakan kesejahteraan umat manusia secara bersama

⁴³ Frets Keriapy, “Pendidikan Kristiani Transformatif Berbasis Multikultural Dalam Kon-

teks Indonesia,” *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (2020): 82–93.

bagi kehidupan bermasyarakat dalam lingkup persoalan politik. Maka sebagai gereja hal yang paling prinsip ialah menjadikan pelayanan sebagai bagian untuk menyatakan kebenaran Firman Tuhan sehingga bisa menjadi terang dan garam, dan bukan meleburkan pelayanan dengan politik praktis sehingga terjadi penyimpangan dalam pelayanan. Gereja dan orang percaya harus memiliki sikap yang tegas terhadap kegiatan politik praktis yang terjadi dalam ranah pelayanan gereja, terutama para aktivis pelayanan gereja, dengan melarang bahkan tidak turut melaksanakan politik praktis.⁴⁴ Namun orang percaya juga memerlukan ketegasan untuk menghidupi kasih dalam menjalani kehidupan untuk berpolitik, seperti Yesus menegaskan bahwa kasih yang sejati bukanlah pengetahuan agama, tetapi praktik dan perilaku kasih harus terlihat pada siapapun,⁴⁵ baik dalam berbagai pandangan tentang politik dan praktisnya.

Namun tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat yang sangat

plural, baik perbedaan karena suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, terlebih-lebih perbedaan paham dan agama, sangat rawan timbulnya konflik dan pertentangan,⁴⁶ dari sudut pandang perbedaan pandangan politik. Sehingga potensi konflik dapat terus berlangsung, menunggu momentum untuk muncul ke permukaan.⁴⁷ Sedangkan kekristenan sejatinya mengajarkan penundukan kepada pemerintah karena pemerintah ditetapkan oleh Allah, dengan demikian terwujud kerukunan.⁴⁸ Sehingga orang percaya dapat mudah dapat menjadi saksi sebagai pribadi yang berkelakuan baik dan dapat menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya Kristus melalui sarana keterlibatannya dalam aktivitas sosial dan budaya masyarakat setempat.⁴⁹

KESIMPULAN

Politik dapat membawa orang percaya memiliki sikap acuh tak acuh. Sikap ini muncul karena melihat kondisi politik nasional hingga daerah dimana

⁴⁴ Tampenawas, "Pandangan Eklesiologi Calvin Mengenai Politik Praktis Dalam Pelayanan Gereja."

⁴⁵ Yonatan Arifianto, "Deskripsi Sejarah Konflik Horizontal Orang Yahudi Dan Samaria," *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 1 (May 2020): 33–39.

⁴⁶ Yonatan Alex Arifianto, "Peran Gembala Menanamkan Nilai Kerukunan Dalam Masyarakat Majemuk," *Voice Of Hamy Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1 (2020): 1–13.

⁴⁷ Arifianto, "Deskripsi Sejarah Konflik Horizontal Orang Yahudi Dan Samaria."

⁴⁸ Yonatan Alex Arifianto and Joseph Christ Santo, "Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen," *Angelion* 1, no. 1 (2020): 1–14.

⁴⁹ Kosma Manurung, "Efektivitas Misi Penginjilan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Gereja," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (April 6, 2020): 225–233.

kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu kuat. Sehingga orang percaya tidak ingin mencelupkan diri dalam kubangan politik yang kotor. Pemikiran seperti ini sering menjadi pembenaran ketidakpedulian terhadap politik. Namun orang percaya juga diizinkan untuk menjadi berkat sebagai terang dan garam ditengah politik supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan menjadikan pemahamannya dalam berpolitik dan bernegara harus berlandaskan Firman Allah.

Dengan mengetahui hakikat politik dan landasannya maka memberi pengertian yang dalam bagi orang percaya untuk memaknai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk berperan dalam mentaati setiap apapun yang negara lakukan untuk memajukan manusia dan negara, walaupun dengan politik. Selanjutnya teladan tokoh filsafat politik memberi pengertian dari sudut pandangnya sebagai acuan bernegara namun orang percaya dapat menerapkan dan mengetahui filsafat politik dalam persepektif iman Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*. Jakarta: Rajawali press, 2011.

Arifianto, Yonatan. "Deskripsi Sejarah Konflik Horizontal Orang Yahudi Dan Samaria." *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no.

1 (May 2020): 33–39.

Arifianto, Yonatan Alex. "Peran Gembala Menanamkan Nilai Kerukunan Dalam Masyarakat Majemuk." *Voice Of Hamy Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 1 (2020): 1–13.

Arifianto, Yonatan Alex, and Joseph Christ Santo. "Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen." *Angelion* 1, no. 1 (2020): 1–14.

Arifianto, Yonatan Alex, and Asih sumiwi Rachmani. "Peran Roh Kudus Dalam Menuntun Orang Percaya Kepada Seluruh Kebenaran Berdasarkan Yohanes 16 : 13." *Jurnal Diegesis* 3, no. 1 (2020): 1–12.

Baggini, Julian. *Lima Tema Utama Filsafat*. Jakarta: Teraju, 2004.

Edi Sumanto. "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)." *EL-AFKAR Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (2017).

Fadil, Muhammad. "GAGASAN DASAR MENGENAI ETIKA DAN NEGARA MENURUT PLATO (SEBUAH PENGENALAN AWAL FILSAFAT POLITIK KLASIK)." *PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya* 9, no. 1 (2008).

Heywood, Andrew. *Politics and Edition*. New York: Palgrave MacMillan, 2002.

Hutasoit, Lia. "KPK Sudah Tangkap 100 Kepala Daerah." *IDN Times*, 2018.

Imron, Ali. "FILSAFAT POLITIK HUKUM PIDANA." *Jurnal Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014).

J.H Rapar. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali, 1988.

Keriapy, Frets. "Pendidikan Kristiani

- Transformatif Berbasis Multikultural Dalam Konteks Indonesia.” *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (2020): 82–93.
- Lega, Fransiskus Sales. “FILSAFAT POLITIK KANT DAN RELEVANSINYA BAGI PERLINDUNGAN MARTABAT MANUSIA.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 8, no. 1 (2016).
- Madung, O.G. *Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Ledalero, 2013.
- Manurung, Kosma. “Efektivitas Misi Penginjilan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Gereja.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (April 6, 2020): 225–233.
- . “Ketubim Dan Nubuat.” *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (July 23, 2020): 129–140. Accessed November 4, 2020. <https://10.0.141.174/pengarah.v2i2.2>.
- . “Studi Analisis Kontekstual Ajaran Karunia Nubuat Rasul Paulus Sebagai Dasar Evaluasi Kritis Terhadap Fenomena Bernubuat Di Gereja Beraliran Karismatik.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (October 25, 2019): 37–54. Accessed November 23, 2019. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/189>.
- Mustofa, A. *Filsafat Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Nurita, Riski Febria. “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* (2015).
- Pasaribu, Marulak. *Eksposisi Injil Sinoptik*. Malang: gandum mas, 2005.
- Riyanto, Armada. *BERFILSAFAT POLITIK*. Yogyakarta: kanisius, 2011.
- Rodee, Carlton Clymer, and dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. 5th ed. Jakarta: Rajawali press, 2002.
- Rusydi, Ibnu. “Filsafat Politik Islam.” *RISALAH Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, 1, no. 1 (2015).
- Said, Abdullah. “Filsafat Politik Al-Farabi.” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 63–78.
- Schmandt, Hendry J. *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Simamora, Adolf Bastian. “POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA.” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* (2019).
- Sinaga, Martin Lukito. “Umat Kristiani Dan Politik Praktis Di Indonesia: Dari Politik Minoritas Ke Politik Pluralisme.” *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* (2017).
- Soesilo, Yushak. “Pentakostalisme Dan Aksi Sosial: Analisis Struktural Kisah Para Rasul 2:41-47.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (April 23, 2018): 136–151. Accessed June 17, 2020. doi: <https://doi.org/10.30648/dun.v2i2.17>.
- Suhelmi, Akhmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Utama, 2001.
- Tampenawas, Alfons Renaldo. “Pandangan Eklesiologi Calvin Mengenai Politik Praktis Dalam Pelayanan Gereja.” *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 115–127.

Wowor, Alter I. "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* (2018).

Zaluchu, Sonny Eli. "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38.